RESTITUSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Yaumi Ramdhani ^{1*}, Ufran²

¹²Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: randyramadhan520@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 22.04.2024

Direvisi: 30.04.2024

Publish: 30.04.2024

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2024

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan

Creative Commons

Attribution 4.0

International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait restitusi bagi warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga utama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang mekanisme tata cara memberikan bantuan. Koordinasi pemulihan korban dan penetapan katagori sebagai korban berada dalam koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mekanisme mendapatkan restitusi sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Kata Kunci: restitusi, restitusi, warga negara asing

ABSTRACT

This research aims to analyze restitution for foreign citizens who are victims of criminal acts of terrorism in Indonesia. This type of research is normative. The results of this research are that the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is the main institution mandated by Law Number 5 of 2018 concerning the mechanism for providing assistance. Coordination of victim recovery and determining the category of victim is under the coordination of the BNPT (National Counterterrorism Agency). The mechanism for obtaining restitution is in accordance with article 8 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime

Keywords: foreign nationals, restitution, terrorism

1. Pendahuluan

Terorisme merupakan fenomena faktual yang telah mengebiri martabat bangsa dan merupakan tragedi kemanusiaan (Wahid, 2011). Isu terorisme seperti api tak kunjung padam, tidak pernah usang dari kancah perdebatan dan diskusi. Tugas utama negara selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi warganya, juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi teror yang menjadi ancaman bagi hak untuk merasakan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan. Fakta yang menunjukkan gerakan-gerakan terorisme kian hari kian merebak. Hal tersebut dapat dilihat dari data bahwa mulai tahun 2000 sampai 2009 tercatat telah banyak peristiwa terorisme dalam bentuk teror bom. Tahun 2000 terdapat 3 kasus, tahun 2001 terdapat empat kasus, tahun 2002 terdapat 3 kasus, tahun 2003 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2004 terdapat 3 kasus, tahun 2005 terdapat lima kasus. Setelah kejadian teror bom di Pasar Palu pada 31 Desember 2005, hingga tahun 2008 tercatat tidak ada kasus bom. Namun pada tanggal 17 Juli 2009, dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriot dan Rizt-Calton Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan pada kedua tempat tersebut, yaitu sekitar pukul 07.50 WIB (Muhammad, 2010).

Bulan Januari 2010 terjadi Penembakan warga sipil di Aceh. September 2010 terjadi Perampokan bank CIMB Niaga. 15 April 2011, ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya. 22 April 2011, rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI. 25 September 2011, ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka. 19 Agustus 2012, granat meledak di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah yang mengakibatkan kerusakan kursi di Pospam Gladak. Pada 31

September 2012 malam penyergapan dilakukan di Jalan Veteran menewaskan teroris Muchsin dan Farhan. Dalam penyergapan itu satu anggota Densus 88 Polri tewas. Oktober 2012 dua anggota Polres Poso ditemukan tewas dibunuh di hutan Tamanjeka, Poso. Tiga anggota Brimob Polda Sulteng ditembak kelompok bersenjata di kawasan Tambarana, Poso pada 20 Desember 2012.

Pada awal tahun 2013, polisi melakukan serangkaian penangkapan teroris, mulai dari Jakarta, Depok, Bandung, Kendal dan Kebumen. Kelompok yang berhasil dibongkar jaringannya adalah kelompok Thoriq, Farhan, Hasmi, Abu Roban (Mujahidin Indonesia Barat) serta sejumlah perampokan bank dan toko emas di berbagai tempat di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terkait juga kelompok Santoso (Mujahidin Indonesia Timur) di Poso. Sejumlah teroris tewas dan berhasil ditahan. Polisi berhasil menembak mati 7 teroris dan menangkap 13 teroris lainnya dalam penyergapan di Jakarta, Bandung, Kendal dan Kebumen yang berlangsung selama dua hari tanggal 8-9 Mei 2013 (Waluyo, 2013). Polisi melakukan penyergapan yang menewaskan 6 teroris kelompok Dayat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada 31 Desember 2013.

Pada tahun 2015 lebih parah dari bulan Januari sampai dengan Februari sudah terjadi 3 teror bom. Baik itu bom bunuh diri di kampung melayu 15 orang di amankan sebagai “Lone wolf terrorism” kemudian sampai pada tanggal 11 September 2017 pihak kepoisian terlibat baku tembak dengan terduga teroris dan menewaskan 2 teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat (Harruma, 2017). Dari setiap adanya tindak pidana, pasti ada pula yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Serangkaian tindakan pidana terorisme di Indonesia tidak sedikit pula menghasilkan korban yang terjadi. Untuk saat ini ada 1.370 korban aksi terorisme di RI, baru 650 yang dapat Kompensasi (Secha, 2022). Dari berita tersebut dapat dipahami bahwa belum semua korban diberikan kompensasi baik korban dari masyarakat, maupun warga negara asing yang berada pada saat kejadian sebagai seorang pendatang yang sedang berlibur atau memiliki pekerjaan di Indonesia.

Korban selama ini hanya dilihat sebagai akhir dari sebuah atau beberapa tindakan terorisme, dan belum secara maksimal dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan terorisme. Ketika tindakan terorisme terjadi maka korban mengalami bentuk penderitaan dan kerugian. Secara fisik; meninggal dunia, mengalami kerusakan tubuh baik permanen/cacat yang membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama ataupun luka ringan. Secara psikologi, dihadapkan dengan perasaan trauma, menutup diri, emosi yang labil dan sebagainya. Secara ekonomi, tidak dapat lagi menafkahi keluarga, kehilangan karier dalam pekerjaan dan masih banyak lagi kerugian yang mesti ditanggung oleh korban tindak pidana terorisme (Siahaan, 2015). Sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan/atau diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, justru berbenturan dengan realita yang ada. Adapun terdapat adagium “res ipsa loquitur” (fakta sudah berbicara sendiri), di mana pada realitanya korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban, baik pada aspek legal substance, legal structure, maupun legal culture (Siahaan, 2015).

Untuk itulah, asas dan perlindungan hak korban harus dapat dimasukkan dan menjadi sebuah panduan yang dapat dituangkan dalam pembuatan kebijakan hukum dan politik yang berpihak pada korban. Hingga saat ini, di dalam peraturan dan kebijakan terkait terorisme terutama di dalam Undang-undang terorisme terbaru No.5 tahun 2018 sudah mulai memasukan “korban terorisme” kedalam beberapa ketentuan pasalnya. Khusus Warga Negara Asing yang dinilai belum atau tidak mengerti tentang hukum yang ada di Indonesia memiliki problematika yang dapat dialami terlebih apabila menjadi korban dalam suatu tindak pidana kejahatan. Dari banyaknya penelitian terkait korban tindak pidana hampir tidak ada yang menyentuh tentang warga negara asing baik aspek perlindungannya dan mekanisme pemberian restitusi sebagai korban khususnya korban tindak pidana terorisme. Untuk itu dalam jurnal ini penulis mencoba menganalisis terkait restitusi bagi warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Metode

Pada penelitian ini penyusun menggunakan penelitian normatif, dimana merujuk pada peraturan hukum, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan peraturan lain yang relevan. Metode penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis data yang digunakan yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data penelitian bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan, karya ilmiah, jurnal-jurnal yang dipustakakan dan yang dimuat di website atau internet.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Korban Tindak Pidana Terorisme Dan Warga Negara Asing

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Istilah Terorisme pertama kali digunakan dalam forum internasional pada 1937 ketika Liga Bangsa Bangsa mempersiapkan sebuah Konvensi yang dikenal sebagai Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.):

“Terrorism attacks the values that lie at the heart of the Charter of the United Nations: respect for human rights; the rule of law; rules of war that protect civilians; tolerance among peoples and nations; and the peaceful resolution of conflict. Terrorism flourishes in environments of despair, humiliation, poverty, political oppression, extremism and human rights abuse; it also flourishes in contexts of regional conflict and foreign occupation; and it profits from weak State capacity to maintain law and order”.

Secara garis besar terorisme adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa, menghancurkan kebebasan asasi atau melanggar kehormatan manusia.

Pengertian terorisme terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Korban nyawa akibat terorisme tidak bisa disangsikan lagi, Kondisi korban, baik korban langsung (*direct victim*), maupun korban tidak langsung (*indirect victim*) dari tindak pidana terorisme, tentunya perlu mendapat perhatian, karena bila tidak, dapat menimbulkan persoalan lanjutan, korban sendiri, korban dan/atau keluarganya akan semakin menderita. Selain itu dampaknya tidak saja berakhir berupa penderitaan nyawa, fisik, dan harta benda saja, tetapi sangat mungkin persoalan psikologis, atau psikososial yang dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Korban menjadi apatis, tidak percaya lagi akan sistem yang ada dalam masyarakat, korban tidak percaya lagi bahwa negara melindungi mereka dari kejahatan. Demikian pula sangat mengkhawatirkan adalah adanya keinginan untuk melakukan balas dendam. Sehingga dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat (Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2016).

Sebelum membahas terlebih jauh ada baiknya untuk memahami definisi korban dan perbedaannya dengan korban tindak pidana terorisme serta definisi singkat tentang warga negara asing.

1. Korban Tindak Pidana Terorisme

Konsep korban dapat dilihat jauh ke masa lalu, masa kehidupan keagamaan yang mengenal pengorbanan manusia atau binatang sebagai salah satu bentuk ritualnya. Andrew Karmen mengatakan *“a victim was a person or animal put to death during the ceremony in order to appease some supernatural power or deity”* (Karmen, 1984).

Secara umum korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Korban dalam istilah bahasa Inggris disebut *“victim”*. *Victim* menurut *Webster’s New American Dictionary* dikatakan *“A human being sacrificed to deity; a person hurt or killed by intention or in an accident; a sufferer from disease; a dupe”*. Korban menurut *Crime dictionary* korban adalah *“Person who has injured mental or psycal suffering, loss or property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another”* (Sola, 1998).

Secara garis besar bahwa yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah mereka menderita karena perbuatan seseorang yang terkait dengan tindak pidana, baik penderitaan tersebut berupa fisik maupun psikologis, kerugian berupa harta benda ataupun adanya kerugian pada hak-haknya. Kerugian tersebut bisa dikarenakan karena perbuatan seseorang ataupun karena seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat:

Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun. Sementara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

“yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan:

“korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang korban kejahatan tersebut di atas pada prinsipnya yang merupakan korban adalah orang ataupun kelompok orang yang menderita fisik, psikologis, dan dirugikan secara ekonomi, ataupun kerugian dalam bentuk hak-haknya *Penal Victimology* dikurangi karena adanya tindak pidana (berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hukum). Termasuk dalam hal ini adalah juga korban tidak langsung (keluarga ataupun mereka yang menjadi korban karena menolong korban dari bahaya agar tidak menjadi korban).

Dalam menentukan pengertian terorisme berdampak pula dengan menentukan siapa korban terorisme tersebut. Sebagaimana dalam menentukan terorisme sangat tergantung pada kepentingan negara yang bersangkutan, maka demikian pula dalam menentukan korban terorisme. Menurut Cristina Flesher Fuminaya dan Rosbary Barberet yang melakukan penelitian dengan menggunakan *qualitative textual content analysis* memetakan bahwa pengertian korban kejahatan terorisme tersebut sangat elastis, hal ini terlihat dari perbandingan antara korban kejahatan terorisme kasus 9/11 di New York (serangan terhadap Twin Tower) dengan serangan teroris 3/11 di Madrid. Korban dalam kasus 9/11 sangat luas tidak hanya mereka yang meninggal atau terluka di Twin Tower (pegawai, pengunjung, penyelamat, pengusaha) tetapi termasuk seluruh pihak yang terdampak dari serangan 9/11 tersebut yang menderita kerugian baik fisik, ekonomi ataupun psikologis. Demikian pula mereka yang melihat terjadinya serangan, yang tinggal dekat lokasi Twin Tower, pebisnis yang kehilangan pekerjaannya, sukarelawan, perawat rumah sakit, bahkan termasuk anjing yang terlibat dalam pencarian korban yang menderita sebagai akibat serangan teroris tersebut dipandang sebagai korban. Sedangkan yang dikategorikan sebagai korban dalam serangan teroris di Madrid hanya mereka yang meninggal, terluka dan keluarganya saja yang dianggap sebagai korban (Fominaya, Cristina Flesher Barbaret, n.d.).

Urain di atas menunjukkan bahwa korban terorisme lebih menjadi perhatian publik dari pada yang sebenarnya bila dilihat dari sisi ilmiah, kebutuhan tergantung pada media. Hal ini berbeda dengan pengertian korban kejahatan dari beberapa instrumen internasional yang dapat diadopsi untuk korban terorisme, yaitu orang perseorangan atau sekumpulan orang yang menderita baik fisik, psikologis, ekonomi karena terorisme. Termasuk di dalamnya adalah korban tidak langsung yang merupakan keluarga dari korban langsung, termasuk pula anggota masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan perbuatan terorisme tersebut.

Pengertian ini sesuai dengan laporan khusus PBB (A/HR/20/14) yang mengidentifikasi adanya empat kategori korban terorisme, yaitu :

1. Korban langsung terorisme (direct victim of terrorism) adalah orang yang terbunuh, menderita luka-luka fisik serius atau psikologis akibat dari terorisme;
2. Korban terorisme sekunder (secondary victim of terrorism) adalah anggota keluarga terdekat, ataupun mereka yang penghidupannya tergantung pada korban langsung;
3. Korban tidak langsung (indirect victim of terrorism) adalah seseorang yang menderita secara fisik, psikologis karena akibat tidak langsung dari perbuatan terorisme. Termasuk dalam kategori ini, yaitu: a. anggota masyarakat (saudara atau pengamat) yang dibunuh atau terluka sebagai akibat dari penggunaan kekuatan untuk menghadapi tersangka teroris; b. saksi mata yang menderita psikologis secara berkesinambungan akibat menyaksikan kekerasan peristiwa teror tersebut atau menyaksikan segera setelah kejadian; c. seseorang yang menjadi sasaran kekerasan oleh pihak yang berwenang karena kekeliruan mengidentifikasi tersangka teroris; d. para penyelamat yang mengalami penderitaan fisik, atau psikologis serius karena ambil bagian dalam penyelamatan;
4. Korban terorisme potensial (potential victims of terrorism), korban terorisme yang potensial di masa yang akan datang menjadi kategori tambahan yang penting (UNODC, 2015).

Kejahatan Terorisme sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini ditentukan bahwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak ada pengertian tentang terorisme, sehingga yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 12.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana terorisme di Indonesia adalah mereka yang menderita, baik fisik, psikologis, psikososial, ataupun harta benda yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tersebut. Dalam hal ini yang dianggap sebagai korban, bukan hanya korban langsung, tetapi juga korban tidak langsung dan mereka yang terdampak kehidupannya karena peristiwa terorisme.

Kemudian dipertegas didalam perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada pasal 1 ayat (11) yang berbunyi:

“Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme”

Pasal 1 terkait definisi ini, mengakui secara jelas dan membakukan lebih spesifik kata “korban tindak pidana terorisme sebagai korban” untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya atas kerugian yang timbul di kemudian hari. Menjadi sebuah awalan langkah kemajuan dan positif dan patut diapresiasi ketika definisi korban tindak pidana teroris telah dicantumkan sebagai dasar pijakan hukum untuk menentukan langkah perlindungan bagi korban selanjutnya. Berbeda apabila dibandingkan dengan UU terdahulu no. 15 tahun 2003 yang sama sekali tidak memasukan pendefinisian tentang korban tindak pidana teroris.

2. Warga Negara Asing

Warga negara asing atau biasa disingkat WNA merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalinya. Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis* Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

“Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada 30 hewan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang - Undang dan peraturan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

“Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”.

3.2. Regulasi Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Dan Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Warga Negara Asing

Memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah penting sebagai salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. Pemenuhan hak-hak tersebut bisa membantu korban dalam menghadapi masa depan dan juga mampu membantu mengurangi ketegangan di dalam masyarakat.

Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang – Undang (Maulana, 2023).

Undang-undang tersebut memberikan penguatan terhadap mandat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, dan juga berdampak bagi rencana kerja LPSK. Praktik pemberantasan terorisme dan penanganan korban terorisme di Indonesia menjadi salah satu model yang dianggap sukses, yakni beriringannya proses penegakan hukum untuk memburu para pelaku aksi terorisme dan pada sisi lainnya perlindungan kepada korban terorisme melalui langkah-langkah pemulihan juga dilaksanakan oleh negara. Sesuai dengan mandat yang diberikan melalui Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, LPSK juga melakukan penghitungan terhadap besaran kompensasi dan menyampaikannya kepada para korban terorisme (Maulana, 2023).

Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Dalam UU 5/2018 mekanisme kompensasi telah diatur secara terang. Pengajuan kompensasi oleh korban, keluarga atau ahli warisnya melalui LPSK dimulai sejak penyidikan. Lalu pengajuan kompensasi tersebut oleh JPU dimasukkan dalam Tuntutan. Dan LPSK akan melakukan pembayaran kompensasi kepada Korban berdasarkan putusan pengadilan. Jika seorang korban terorisme tidak mengajukan permohonan, LPSK dapat melakukannya sendiri dengan tata cara yang sama seperti jika menerima permintaan dari korban terorisme(Maulana, 2023).

Pemberian kompensasi tersebut nyatanya bukan hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi ada beberapa Warga Negara Asing. Sebelum membahas mekanisme pemberian restitusi bagi Warga Negara Asing ada baiknya memahami terlebih dahulu mengenai pengaturan hak-hak korban terorisme serta perbedaan antara kompensasi dan restitusi.

1. Pengaturan Hak-hak Korban Terorisme

Di dalam suatu sistem hukum maka terdapat suatu hubungan hukum antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak dapat memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, yang wajib dilaksanakan untuk mendapatkan hak tersebut (Mertokusumo, 2010). Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi(Mertokusumo, 2010). Saat ini perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana dapat dikatakan relatif kecil. Hal ini ditunjukkan pada sedikitnya pembahasan mengenai korban di dalam KUHP, yakni hanya terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Sangat berbanding terbalik ketika melihat dari sisi pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena begitu banyaknya korban dari hasil tindak pidana itu sendiri. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Pasal 6: Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7 ayat (1), Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Ayat (2): Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 memberikan definisi:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Perihal Hak-hak korban tindak pidana terorisme yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdiri; bantuan medis; rehabilitasi psikososial dan psikologis; santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan kompensasi; restitusi dan pelaksanaan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara urusan di bidang perlindungan saksi dan korban dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK yang bekerjasama dengan instansi/Lembaga lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dalam pembagian jenis hak korban terorisme adalah sama dengan apa yang dikategorikan pembagiannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Secara substansi pemahaman hak korban yaitu hak atas bantuan, kompensasi, restitusi dari ketiga peraturan perundangan diatas sudah cukup memadai.

Jika dilihat dari daftar hak-hak korban terorisme yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diatas, maka ada beberapa hak yang belum dapat diakomodir. Meliputi; hak atas akses informasi, martabat dan keselamatan korban, melindungi privasi dan kerahasiaan korban, bantuan hukum, melindungi korban dalam investigasi kontraterorisme dan dalam proses pidana. dan bantuan “spiritual” sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keyakinan dan kepercayaan agama dari masing-masing korban. Namun permasalahan tersebut sudah ada sebagai hak-hak yang bisa diakomodir dan dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seperti hak atas informasi, perlindungan dan keamanan, bantuan hukum.

2. Mekanisme Pemberian Restitusi bagi Warga Negara Asing WNA

Pada awalnya pengaturan tentang pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban
2. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
3. Pengaturan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU No. 15 tahun 2003, terdapat dalam beberapa pasalnya antara lain:
4. Pasal 36 tentang kompensasi dan rehabilitasi
5. Pasal 37 tentang rehabilitasi
6. Pasal 38 tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
7. Pasal 39 tentang rentang waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
8. Pasal 40 tentang pelaksanaan pemberian kompensasi

Kemudian ditambahkan pemberian bantuan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Pasal 35 B ayat 1, 2, 3) dalam bentuk medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme dan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Memiliki makna bahwa sudah sangat jelas diatur bahwa LPSK adalah lembaga utama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang mekanisme tata cara memberikan bantuan. Namun koordinasi pemulihan korban dan penetapan kategori sebagai korban tetap berada dalam koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Memiliki arti bahwa, seseorang atau lebih harus mendapatkan ketetapan sebagai korban terlebih dahulu sebagai “Korban” dari BNPT yang kemudian mekanisme tata cara pemberian bantuan ataupun kompensasi dan restitusi dilakukan oleh LPSK. Pengaturan bantuan berbeda dengan kompensasi, dimana tata cara pemberian bantuan cukup berpedoman pada internal LPSK melalui keputusannya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam pasal 6 Ayat 2 “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

BNPT merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk berdasarkan PERPRES Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1)

Perpres Nomor 46 Tahun 2010, mempunyai tugas yakni menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Rajjab, 2016).

Dalam proses pengajuan permohonan surat penetapan korban tindak pidana terorisme yang diberikan dan diproses oleh BNPT sesuai dengan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan program pemulihan korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana masa lalu, dan korban tindak pidana terorisme di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing dalam situs resminya BNPT memberitakan sedikit mengenai proses asesmen BNPT dan LPSK, bahwa kegiatan Assesment of the Victims of Terrorisms kepada Warga Negara Asing yang menjadi korban terorisme masa lalu di Indonesia dilakukan secara daring. Asesmen yang dijalani merupakan syarat penting bagi para korban untuk mendapat Surat Penetapan Korban. Asesmen dilakukan dengan wawancara selama 60 menit, selama 30 menit oleh BNPT dan 30 menit oleh LPSK. Wawancara dan asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi para korban berdasarkan kronologi kejadian, luka-luka yang dialami baik luka fisik maupun psikologis, serta jenis bantuan atau layanan yang diterima para korban WNA baik dari Pemerintah Indonesia atau dari Pemerintah tempat WNA tinggal. Dalam pemeriksaan tersebut didampingi oleh perwakilan dari Direktorat Kerjasama Bilateral, Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri, Perwakilan dari Kedutaan Besar negara WNA serta Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (BNPT, 2021).

Dapat dipahami bahwa karena status warga negara maka WNA lebih butuh pendampingan yang ketat mengingat baik dari Pemerintah Indonesia tempat status korban ditetapkan dengan Pemerintah negara tempat WNA berasal terdapat kemungkinan kerjasama dan untuk menjaga kestabilan, kedamaian, dalam kerjasama antar negara tersebut maka BNPT lebih banyak berkoordinasi. Sedangkan bila dilihat status WNA sebagai korban tindak pidana terorisme tetap sama baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Sedangkan mengenai sedikit banyaknya nominal dalam restitusi antara keduanya hanya dapat dilihat dari putusan hakim dan dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk mencari jawabannya.

Secara garis besar baik restitusi maupun kompensasi sama-sama ditujukan kepada korban, hanya saja terdapat beberapa perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, maupun korban. Selanjutnya, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 apabila korban adalah anak, maka pihak yang mengajukan restitusi dilakukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK. Sedangkan, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Pihak yang memberikan ganti kerugian berupa kompensasi menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2020) jo Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

Sementara itu, Pasal 1 angka 5 PP No. 35 Tahun 2020 jo Pasal 1 angka 1 Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan pihak pemberi restitusi sebagai:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

Oleh karena itu, ganti kerugian berupa kompensasi diberikan oleh negara dan restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) mekanisme pengajuan ganti kerugian berupa restitusi bagi korban maupun keluarga korban, yakni melalui pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum maupun sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. 2 Hal ini berbeda dengan cara untuk memperoleh kompensasi yang menurut Pasal 19 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 diatur sebagai berikut:

“Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:

1. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
 2. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.”
- Berdasarkan pemaparan di atas, restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam kompensasi pada dasarnya hanya dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Baik restitusi maupun kompensasi memiliki bentuk ganti kerugian yang berbeda satu sama lain. Dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2022 mengatur sebagai berikut:

“Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.”

Hal ini berbeda dengan pengaturan ganti kerugian berupa kompensasi, menurut Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

“Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana termasuk luka atau kematian;
3. penggantian biaya perawatan dan/ atau pengobatan; dan
4. ganti kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.”

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ganti kerugian restitusi mencakup ganti kerugian di luar tindak pidana yang dialami korban, misalnya biaya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan ganti kerugian pada kompensasi hanya ditujukan untuk kerugian yang berkaitan langsung dari suatu tindak pidana yang dialami.

Selain perbedaan mengenai bentuk kerugian, pengadilan yang mengadili masalah ganti kerugian kompensasi dan restitusi juga berbeda. Menurut Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan sebagai berikut:

Kemudian, Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2022 merumuskan:

“Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadili pelaku tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan Pasal 3 dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2022 tersebut, maka tampak bahwa pengadilan yang berwenang mengurus ganti kerugian terhadap suatu tindak pidana berbeda. Akan tetapi, selain menjelaskan mengenai pengadilan yang berwenang, pasal tersebut juga menjelaskan mengenai bentuk tindak pidana yang mempengaruhi jenis ganti kerugian yang diberikan.

4. Kesimpulan

Istilah Terorisme pertama kali digunakan dalam forum internasional pada 1937 ketika Liga Bangsa Bangsa mempersiapkan sebuah Konvensi yang dikenal sebagai Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Korban dalam hal ini adalah mereka menderita karena perbuatan seseorang yang terkait dengan tindak pidana, baik penderitaan tersebut berupa fisik maupun psikologis, kerugian berupa harta benda ataupun adanya kerugian pada hak-haknya. Kerugian tersebut bisa dikarenakan karena perbuatan seseorang ataupun karena seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Karena status warga negara maka WNA lebih butuh pendampingan yang ketat mengingat baik dari Pemerintah Indonesia tempat status korban ditetapkan dengan Pemerintah negara tempat WNA berasal terdapat kemungkinan kerjasama dan untuk menjaga kestabilan, kedamaian, dalam kerjasama antar negara tersebut maka BNPT lebih banyak berkoordinasi. Sedangkan bila dilihat status WNA sebagai korban tindak pidana terorisme tetap sama baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Sedangkan mengenai sedikit banyaknya

nominal dalam restitusi antara keduanya hanya dapat dilihat dari putusan hakim dan dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam untuk mencari jawabannya.

Daftar Pustaka

- BNPT. (2021). *WNA korban teroris masa lalu jalani proses asesmen BNPT dan LPSK*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. <https://www.bnpt.go.id/wna-korban-bom-terorisme-masa-lalu-jalani-proses-asesmen-bnpt-dan-lpsk>
- Fominaya, Cristina Flesher Barbaret, R. (n.d.). *Defining the Victim of Terrorism : Competing frame aroun victim compensation and commemoration post 9/11 New York and 3/11 Madrid*. 2012. http://www.academia.edu/1137794/defining_the_victim
- Harruma, I. (2017). *Penembakan terduga Teroris di Bima*. Suara NTB.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, D. (2016). *Laporan Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Terorisme*.
- Karmen, A. (1984). *Crime Victims, An Introduction*. Cole Publishing Comp.
- Maulana, I. (2023). *Daftar penerima kompensasi (Korban Terorisme) pasca UU 5/2018 berdasarkan putusan pengadilan*. LPSK. <https://lpsk.go.id/publikasi/detailinformasi/3284>
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2010). *Teroris Ideologi Penebar Ketakutan*. Liris.
- Rajjab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *RechtsVinding*, 5(1), 1–15. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_1_JRV_5.1_WATERMARK.pdf
- Secha, K. N. (2022). *Ada 1.370 Korban Aksi Terorisme di RI, Baru 650 yang Dapat Kompensasi*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6246173/ada-1-370-korban-aksi-terorisme-di-ri-baru-650-yang-dapat-kompensasi#:~:text=Sampai saat ini tercatat ada ,21%2F8%2F2022>.
- Siahaan, B. (2015). KAJIAN YURIDIS TENTANG SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER). *Lex Crimen*, IV(1), 178–187.
- Sola, R. de. (1998). *Crime Dictionary*. Facts on File Publication.
- United Nations Office on Drigs and Crime. (n.d.). *Global Action Against Terrorism*. United Nations Office on Drigs and Crime. <http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/global-action-against-terrorism.html>.
- UNODC. (2015). *Good Practice in Sportting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework*. UNODC.
- Wahid, A. (2011). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Aditama.
- Waluyo, A. (2013). *Densus 88 Tangkap 13 Terduga Teroris, Tembak 7 Lainnya*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/densus-88-tangkap-13-terduga-teroris-tembak-7-lainnya/1657535.html>